

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Komunikasi publik merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga kesinambungan demokrasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan. Di era digitalisasi yang berkembang pesat, transformasi teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola interaksi antara lembaga pemerintah dengan publik, memungkinkan akses informasi yang lebih cepat, transparan, dan inklusif. Namun, tantangan seperti kesenjangan digital dan keterbatasan infrastruktur tetap menjadi isu krusial, terutama di tingkat daerah di Indonesia. Penelitian ini difokuskan pada analisis komunikasi publik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanah Datar, yang merupakan salah satu lembaga legislatif yang berperan sebagai pengawas dalam berjalanya pemerintahan daerah, di mana peran digitalisasi belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk memperkuat partisipasi masyarakat.

Masalah ini semakin relevan di DPRD Tanah Datar, di mana komunikasi publik sering kali terhambat oleh keterbatasan infrastruktur digital dan kurangnya literasi media di kalangan masyarakat pedesaan. Analisis ini diperlukan untuk mengeksplorasi bagaimana strategi komunikasi publik dapat dioptimalkan, terutama dalam konteks pemerintahan daerah. Penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Kurnia et al. (2018), menunjukkan bahwa di Indonesia, era digitalisasi telah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, tetapi juga menimbulkan risiko seperti misinformasi dan polarisasi. Di Tanah Datar, hal ini terlihat dari penggunaan media sosial oleh DPRD untuk kampanye publik, yang belum sepenuhnya efektif dalam mencapai audiens muda.

Lebih lanjut, dalam konteks teori komunikasi politik, Purbo (2019) dalam bukunya *Komunikasi Politik di Era Digital* menjelaskan bahwa era digital dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, tetapi juga berpotensi

menimbulkan risiko seperti penyebaran informasi yang tidak akurat jika tidak dikelola dengan baik. Di Tanah Datar, fenomena ini terlihat melalui upaya DPRD dalam mengimplementasikan inisiatif e-government, sebagaimana dilaporkan dalam berita Kompas (2022), yang menyebutkan adanya keluhan masyarakat terkait aksesibilitas informasi digital. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi teknologi dan realitas pelaksanaan, yang menjadi dasar penting untuk dilakukan analisis mendalam.

Komunikasi publik ini menjadi elemen penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Melalui komunikasi publik yang efektif, masyarakat dapat memahami kebijakan pemerintah daerah, sementara DPRD memperoleh masukan dan aspirasi langsung dari konstituen. Salah satu bentuk nyata komunikasi publik tersebut adalah kegiatan reses. Dimana reses merupakan masa dimana anggota DPRD kembali ke daerah pemilihannya untuk bertemu langsung dengan masyarakat atau konstituen yang diwakilinya. Kegiatan reses ini bertujuan untuk menyerap aspirasi, menampung permasalahan yang dihadapi masyarakat, serta mensosialisasikan berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah.

Pada tahun 2025, DPRD Kabupaten Tanah Datar melaksanakan reses sebanyak tiga kali dalam satu tahun, sesuai dengan tata tertib DPRD nomor 1 tahun 2022 yang mengacu kepada peraturan pemerintah nomor 12 Tahun 2018 mengenei pedoman penyusunan tata tertib DPRD. Aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam kegiatan reses menjadi dasar penting dalam mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar dalam melaksanakan kegiatan dan pemerataan pembangunan secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan laporan akhir yang mendokumentasikan secara komprehensif pelaksanaan reses dan penerapan komunikasi publik yang telah dilakukan.

Diantara fungsi DPRD adalah sebagai pembuat perda, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, sehingga komunikasi publik benar-benar sangat diperlukan dalam melaksanakan fungsi-fungsi tersebut. Untuk fungsi pembuat perda contohnya,

anggota DPRD sangat berperan dalam pembuatan perda ini dan yang harus diperhatikan dalam pembuatan perda ini adalah poin-poin yang di suarakan oleh masyarakat yang diwakilinya agar dapat di wujudkan dalam bentuk perda yang di buat oleh DPRD bersama dengan Pemerintah Daerah. sama halnya dengan kedua fungsi lainnya, dalam fungsi anggaran anggota DPRD juga akan menyuarakan suara konstituennya sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Begitu juga halnya dengan fungsi pengawasan dimana setelah semua kegiatan berlangsung maka penulis sebagai bagian dari DPRD akan melakukan pengawasan pada pelaksanaan kegiatan yang berada di Kabupaten Tanah Datar umumnya di dapil penulis sendiri secara khusus.

Sehingga reses merupakan momen penting bagi anggota DPRD untuk menjalankan tugas konstitusionalnya, yaitu menyerap aspirasi, menyampaikan informasi program kerja, dan mengawasi pengasan pembangunan. Reses ini menjadi jembatan untuk memperpendek jarak komunikasi antara konstituen dengan Anggota DPRD, sehingga dapat dipastikan bahwasanya aspirasi yang disampaikan lebih terukur dan terstruktur.

1.2 Tujuan

Adapun Tujuan dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan pelaksanaan komunikasi publik dalam kegiatan reses DPRD dan membandingkannya dengan teori yang ada
2. Menganalisis faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan reses
3. Membandingkan teori yang ada dengan penerapan pelaksanaan reses dilapangan

1.3 Manfaat

Project ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori komunikasi publik dengan mengeksplorasi interaksi antara era digitalisasi dan konteks lokal

seperti DPRD Tanah Datar. Hal ini melengkapi kerangka teori seperti yang dikemukakan oleh Habermas (1989) tentang ruang publik, dengan menambahkan perspektif empiris dari daerah pedesaan Indonesia. Selain itu, analisis ini dapat menjadi referensi untuk pelaksanaan reses selanjutnya, seperti yang disarankan oleh Kurnia et al. (2018), dengan melihat hasil dari pelaksanaan reses anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar, tugas akhir ini memperkaya literatur ilmu komunikasi melalui integrasi teori global dan konteks lokal.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil analisis ini dapat digunakan oleh DPRD Tanah Datar untuk meningkatkan strategi komunikasi publik, sehingga menjadi bahan evaluasi pelaksanaan reses dan peningkatan kualitas komunikasi publik DPRD kedepannya.